



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 931/I/XI/2016

**APBN 2017 Penting untuk  
Hadapi Ekonomi Global**

**Plus Minus Dua Tahun  
Pemerintahan Jokowi  
Jadi Sorotan**

**BKSAP Telaah SDM dan  
Daya Saing UMKM Jerman**



**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan

# APBN 2017 Penting untuk Hadapi Ekonomi Global

DPR RI mengapresiasi pemerintah atas laporan dan kerjasamanya dalam membahas RAPBN 2017. APBN 2017 sangat penting untuk melangkah lebih jauh ke depan dan menghadapi ekonomi global. Apalagi, UU Pengampunan Pajak telah disahkan dan responnya sangat positif.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna yang mengesahkan RAPBN 2017, Rabu (26/10) kepada pers. Selain menyampaikan apresiasi, Taufik juga mengungkapkan seputar defisit anggaran 2017 yang mencapai lebih Rp330 triliun. Menurutnya, defisit ini untuk memancing laju pertumbuhan.

"Memang ada batasan. Defisit tidak boleh lebih besar. Jangan sampai jadi pola gali lubang tutup lubang. Tetapi sekali lagi defisit ini tujuannya bagaimana merespon laju pertumbuhan ekonomi dengan defisit transaksi berjalan," jelas Taufik.

Ditambahkannya, APBN yang baru saja disahkan ini bersamaan dengan penantian ekonomi global atas apa yang terjadi di panggung politik Amerika Serikat. Seperti diketahui, Amerika sedang punya hajat besar, yaitu pemilihan presiden. "Para pelaku ekonomi dunia sedang menunggu jadi tidaknya

kenaikan suku bunga FED. Siapa yang menang, Republik atau Demokrat, selalu ditunggu oleh ekonomi global," ujar Taufik lagi.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir dalam laporannya menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2017 yang sudah disepakati bersama pemerintah. Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,1% dari sebelumnya 5,3%. Inflasi disepakati 4,0%. Nilai tukar rupiah Rp13.300/USD. Tingkat suku bunga SPN 3 bukan 5,3%. Harga minyak 45 USD/barel. *Lifting* minyak 815 ribu barel/hari. Dan *lifting* gas bumi 1,15 juta barel setara minyak/hari.

Pendapatan negara dalam APBN 2017 ditetapkan Rp1.750.283,4. Sedangkan belanja negara mencapai Rp2.080.451,2. Ada defisit yang disepakati tahun 2017 ini sebesar 2,41% terhadap PDB atau Rp330.167,8. ■

(mb), Foto: Icaan/br



Pimpinan DPR RI berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani

# SOM Setujui Pembentukan BUMN Panas Bumi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan sejumlah Kementerian mengadakan pertemuan tingkat *Senior Officials Meeting (SOM)*, guna membahas 'Potensi, Tantang, dan Usulan Solusi Pengembangan Panas Bumi di Indonesia'.

Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi sejumlah anggota DPR RI, mengatakan saat konferensi pers, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut, yang pada intinya seluruh instansi yang hadir mendukung program 35.000 megawatt kegiatan energi panas bumi, yang dicanangkan presiden Joko Widodo.

Salah satu bentuk persetujuan adalah DPR RI dan Kementerian yang hadir merekomendasikan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus di bidang panas bumi.

"Dibentuknya BUMN khusus yang menangani panas bumi, karena saat ini hanya Pertamina *Geothermal* dan *GeoDipa* yang melakukan pengelolaan, dan tentunya tidak selancar jika ditangani oleh BUMN khusus," kata Agus di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Sebab, lanjut politis fraksi Demokrat itu, saat ini hanya Pertamina *Geothermal* dan *GeoDipa* saja yang menangani pengelolaan energi panas bumi. Padahal, potensi yang dihasilkan dari pengelolaan panas bumi di Indonesia masih sangat besar, dan memerlukan BUMN khusus untuk



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi sejumlah Anggota DPR RI

mengelolanya secara optimal.

"Saya berharap pemerintah mendukung penuh upaya pembentukan BUMN pengelola energi panas bumi ini, agar potensi energi *geothermal* yang dimiliki Indonesia bisa dikelola dengan baik. Karena jika bergantung pada fosil lama-kelamaan akan habis," katanya.

Selanjutnya dari hasil rapat itu juga, Agus mengatakan bahwa pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas pendanaan yang ada seperti dana panas bumi di PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri. Hal ini dilakukan di bawah koordinasi Kementerian ESDM.

Kemudian, adanya penguatan kerjasama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan *study* zona untuk wilayah kerja panas bumi pada zona inti.

Dalam pertemuan tersebut sepakat diperlukan Peraturan Menteri ESDM tentang pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh dan pencabutan izin wilayah kerja panas bumi yang tidak melakukan

kegiatannya.

Seperti diketahui, pertemuan tersebut dihadiri jajaran pemerintah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Wamen Arcandra Tahar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Serta dihadiri pula oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dari Pimpinan komisi, turut hadir, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu dan Anggota Komisi VII Satya Widya Yudha. ■

(rnm), Foto: Jayadi/br

BULETIN PARLEMENTARIA



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naeuforoji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |**

## DPR RI Dorong Percepatan Pengembangan Energi Panas Bumi

Kebutuhan energi nasional makin meningkat setiap tahun, saat ini Indonesia masih mengandalkan energi dari minyak bumi dan batu bara dalam memenuhi kebutuhan. Karena energi tersebut terbatas, DPR RI memandang sudah saatnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi non fosil untuk mengimbangi kebutuhan energi saat ini.

Dengan latar belakang tersebut, maka diselenggarakanlah diskusi tingkat *Senior Officials Meeting (SOM)*, di Ruang Lounge, Nusantara II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/10). Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, dalam sambutannya dia berharap dapat berbagi pemikiran dalam rangka mempromosikan energi panas bumi, sehingga dapat mencapai target pengembangan yang telah dicanangkan bersama.

"Energi panas bumi adalah salah satu dari energi terbarukan yang potensinya



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

amat besar di Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia belum maksimal, sehingga baru dimanfaatkan sekitar lima persen dari total potensi yang ada," papar Agus.

Dia juga menjelaskan, DPR RI sangat mendorong semua langkah-langkah yang dapat mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Agus berharap langkah positif ini dapat didukung semua pihak sehingga Indonesia dapat menghadapi

tantangan kemajuan zaman.

Dalam acara ini hadir jajaran pemerintah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Wamen Arcandra Tahar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Serta dihadiri pula oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dari Pimpinan Komisi, turut hadir, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu dan Anggota Komisi VII Satya Widya Yudha. ■

(dcb), Foto: Juyadi/hr

## DPR RI Dukung Langkah Presiden Basmi Pungutan Liar

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto menghadiri acara rapat koordinasi Presiden dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang diselenggarakan di Istana Negara, Rabu (26/10). Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPR RI menyatakan mendukung langkah Presiden dalam membasmi masalah pungutan liar.

“Kita dari Pimpinan Lembaga Tinggi Negara diminta untuk memberikan masukan dan pendapat. Pada prinsipnya kami telah sampaikan, bahwa DPR RI mendukung langkah Presiden yang melakukan gebrakan untuk membasmi pungutan liar. Karena hal tersebut menjadi salah satu indikasi dukungan penuh dari pemerintah untuk konsen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek pungutan liar sekecil apapun,” ujar Taufik.

Menurutnya, Pimpinan DPR RI tidak melihat masalah besar kecilnya, tetapi yang penting dalam hal ini adalah DPR RI mengapresiasi langkah Presiden, yang

sekarang telah mulai dilakukan juga oleh para pejabat ditingkat daerah, baik Gubernur maupun Bupati yang juga melakukan sidak ditempat pelayanan publik.

"Selain itu, kita juga menyampaikan mengenai perubahan situasi perkembangan jaman yang sedang terjadi saat ini, yang kita kenal dengan nama transformasi kultural. Baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, maupun budaya, yang semua itu tidak lepas dari proses kemajuan teknologi informasi," jelasnya.

Masyarakat sekarang memang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik, lanjutnya, tetapi transparansi ini memang

tidak dapat langsung terbuka selebar-lebarnya.

"Pemerintah dan DPR RI memberikan batasan mana yang dapat menjadi konsumsi publik, dan mana yang bersifat privat untuk keselamatan negara. Hal itu menjadi salah satu bahan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI," jelas Taufik.

Taufik mengatakan, instrumen yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum sebenarnya sudah sangat kuat, ada UU KPK, UU Kepolisian Negara, UU Kejaksaan Agung, UU BPK, UU Perbendaharaan Negara, UU Kementerian Negara, UU Keuangan Negara, tinggal bagaimana *goodwill* politiknya yang sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. ■



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

(dep), Foto: Jaka/hr

## BKSAP Telaah SDM dan Daya Saing UMKM Jerman

Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar, mengaku terkesan dengan paparan yang disampaikan *MinR Plessing, Director European policy/coordination, EU structural policy and EU law*. Dia menyampaikan, mengenai pasar tunggal Eropa dan kebijakan UMKM di Jerman. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jerman, dimana 99,6 persen perusahaan Jerman termasuk dalam kategori UMKM dan menyerap tenaga kerja sebanyak 16 juta orang atau 59,2 persen dari total angkatan kerja.

Rofi tertarik, terutama mengenai faktor-faktor internal yang membuat UMKM Jerman mampu bersaing di tengah ekonomi regional. Selain itu, peran kamar dagang di sana dalam promosi didukung pula oleh peran pemerintah dalam menyediakan informasi perdagangan dan investasi serta kebijakan multilateral yang *pro-open market* dan *fair trade*.

"Faktor yang meliputi kualitas tenaga kerja melalui sistem pendidikan ganda (*duales system*), budaya riset untuk meningkatkan inovasi, dukungan pembiayaan dan orientasi ekspor tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya yang telah dipetakan secara spesifik oleh pemerintah dan sektor swasta tidak dipungkiri telah menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan UMKM," jelas Rofi dalam rilis yang diterima Parlemen Rabu (26/10).

Indonesia tetap memegang peran penting di ASEAN dan seiring dengan penyatuan ekonomi regional sebagai pasar tunggal dan basis produksi bersama melalui implementasi MEA, peran Indonesia semakin signifikan. Bagi Jerman, Indonesia tetap merupakan mitra kerja sama utama di kawasan Asia Tenggara.

Hal tersebut dikemukakan anggota Parlemen Jerman, Jurgen Klimke (CDU/CSU), dalam pertemuan

dengan delegasi BKSAP di Berlin pada tanggal 18 Oktober 2016. Jurgen Klimke yang berasal dari aliansi partai

kondenser di Cilegon yang juga menyuplai komponen *low pressure outer casing, low pressure inner casing, blade*



Delegasi BKSAP DPR RI

mayoritas didampingi beberapa anggota dari partai lainnya termasuk dari koalisi alternatif *Alliance 90 the Greens*.

Agenda pertemuan dengan Parlemen Jerman merupakan rangkaian dari kunjungan BKSAP ke Jerman guna menelaah pembangunan sumber daya manusia dan daya saing UMKM lokal Jerman di tengah integrasi regional Uni Eropa. Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP, Juliari Batubara, melakukan pula agenda pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman.

Rangkaian kunjungan BKSAP DPR RI ke Berlin ditutup dengan kunjungan lapangan ke pabrik gas turbin Siemens AG. Saat ini Siemens AG memiliki pabrik produksi

*ring* dan *combustion chamber* ke berbagai negara termasuk diantaranya ke Amerika Serikat, Brazil, Italia, Tiongkok, dan Australia.

Sedangkan turbin uap tekanan tinggi yang dirakit di Cilegon telah dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek Siemens di berbagai negara termasuk proyek PLN di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Siemens menyampaikan komitmen mereka bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia melalui alih teknologi. Siemens menyambut baik inisiatif Kemenaker yang saat ini melibatkan PMA untuk turut mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan membangun sistem pelatihan kerja dan sertifikasi profesi secara terpadu bagi pekerja Indonesia. ■

(BKSAP-eko), Foto: dok\_bksap/br.

## Anggota Komisi VIII DPR RI Nilai Pemerintah Kurang Optimal Lakukan Pembinaan Masyarakat

Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Asli Chaidir menilai pemerintah kurang optimal dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat. Hal itu diungkapkannya usai rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta, Kamis (20/10).

“Banyaknya masyarakat yang menjadi pengikut padepokan-padepokan yang mengajarkan ritual dan ajaran sesat seperti yang terjadi baru-baru ini menjadi salah satu tanda bahwa masyarakat kita saat ini cenderung menginginkan sesuatu yang instan. Meskipun hal tersebut diluar logika dan nalar. Hal ini sekaligus sebagai tanda kurang optimalnya Kementerian terkait seperti Kementerian agama dan sosial untuk ikut memberikan bimbingan pada masyarakat agar tidak mudah mengikuti padepokan seperti itu,” ungkap Asli.

Lebih jauh politisi dari Fraksi PAN ini juga melihat bahwa modus yang digunakan tersangka penggandaan uang itu seperti MLM



Anggota Komisi VIII DPR RI M Asli Chaidir

(Multi Level Marketing), mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian

memberikan dana tersebut kepada orang lainnya secara bergantian sebagai sebuah keuntungan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Sosial yang notabene merupakan mitra kerjanya di Komisi VIII untuk lebih optimal memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui tokoh-tokoh agama dan pemuka adat. Mengingat program bimbingan masyarakat tersebut juga telah masuk dan dianggarkan dalam program kerja kedua mitra kerjanya tersebut. ■

(ipw), Foto: Arif/br

## Pencemaran Sungai Citarum Perlu Ditangani Serius

Peran Sungai Citarum cukup besar bagi denyut perekonomian nasional, saat ini kondisi sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut tengah mengalami krisis akibat tercemar oleh berbagai limbah, termasuk limbah kimia beracun dari industri.

Kendati kerap menjadi sorotan, kondisi sungai Citarum tak juga urung membaik. Akibat krisis yang dialami itu, kini Citarum menyandang predikat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi menyatakan bahwa pencemaran sungai Citarum akan berdampak serius, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Sungai Citarum merupakan bagian dari peradaban nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak didalamnya. Oleh karena itu dampak pencemaran Citarum menjadi sangat serius karena selain menyebabkan banjir, tetapi juga

menjadi polusi yang berbahaya bagi kesehatan," ucap Yadi Srimulyadi.

Menurutnya, pemanfaatan sungai Citarum dari hulu hingga hilir sangat bervariasi, mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan hingga industri. Sungai citarum mengalir 12 wilayah administrasi kabupaten/kota.

Citarum menyuplai air untuk kebutuhan penghidupan 28 juta masyarakat, Sungai yang merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Dengan panjang sekitar 269 km mengalir area irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Tak hanya itu peran strategis Citarum juga terkait

dengan suplai air untuk waduk Jati luhur, Saguling dan Cirata untuk kebutuhan listrik pulau Jawa, Madura dan Bali.

"Saat ini terdapat sekitar 500 pabrik terdapat di daerah hulu Citarum, dan hanya sekitar 20 persen saja yang melakukan pengelolaan limbah. Pabrik diluar itu membuang limbah langsung ke sungai Citarum dan anak sungainya tanpa pengawasan pihak berwenang. Tak heran bila sungai Citarum terpapar polusi limbah pabrik," tegas politisi F-PDIP tersebut.

Yadi menilai problema Citarum sangat kompleks. Selain polusi, luapan Citarum sering menimbulkan banjir yang cukup parah di wilayah Bandung Selatan.

## Banyak Sarpras Sekolah Pontianak Rusak Parah

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Sarpras Dikdasmen) Komisi X DPR RI yang dipimpin Abdul Fikri meninjau sarana dan prasarana di SMPN 22 Pontianak dan SMKN 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (21/10)

“Terdapat 1.300.000 ruang kelas yang rusak total, rusak berat dan sedang di seluruh Indonesia dan 500.000 lagi dinyatakan baik, oleh karena itu tim Kunker Panja Sarpras Dikdasmen ini dibentuk dan untuk melihat di lapangan seberapa serius kerusakan tersebut,” ungkap Fikri.

Tim Komisi X mendapatkan beberapa temuan kerusakan berat terutama di atap kelas ruang yang bocor, jalan lantai koridor yang miring, tembok yang retak dan beberapa konstruksi bangunan yang sudah memprihatinkan.

"Ada 24 rombongan ada 14 ruang, ternyata fisik masih bagus tetapi konstruksinya



Tim Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI meninjau SMPN 22 dan SMKN 1 Pontianak

yang sudah tidak bagus dan memprihatinkan. Sudah 30 tahun belum ada peremajaan meubelair contohnya kursi siswa yang sudah goyang dimakan

Sementara penanganan yang dilakukan tidak konsisten dan menyentuh akar persoalan. Ia mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah Citarum perlu ada

semacam *sharing* yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Citarum.



Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi

"Saya pikir perlu ada semacam musyawarah nasional yang melibatkan semua pihak, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Citarum. Dari musyawarah ini kita akan mencari jalan keluar masalah Citarum dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Disamping melakukan pendekatan kultural, lanjutnya, pemerintah juga harus bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan Citarum.

"Persoalan Citarum adalah persoalan bangsa, ada jutaan rakyat yang hidup dari aliran sungai Citarum tersebut. Oleh sebab itu mutlak perlu adanya penegakan hukum. Kalau ada pihak-pihak yang melanggar peraturan harus ditindak tegas. Jika tidak disertai dengan penegakan hukum yang kuat, maka akan sulit mengawal penyelesaian Citarum," pungkask yadi. ■

(dep), Foto: Anubri/br

rayap dan kursi yang beraneka ragam yang merupakan sumbangan dari walimurid," jelas Fikri.

Lebih lanjut dikatakan, lulusan SMK kenyataannya banyak yang menganggur, ketika sekolah ditinjau ternyata banyak prasarananya yang sudah tidak mendukung, tidak nyambung dengan dunia pendidikan dan dunia kerja.

Menurut politisi PKS ini, fisik bangunan SMKN 1 Pontianak yang dibangun tahun 1986 hingga saat ini belum ada peremajaan, termasuk Laboratorium Komputer yang masih menggunakan Pentium 1 dan 2, Lab. Bahasa yang dibangun tahun 1990 yang masih menggunakan kaset pun sudah tidak bisa digunakan, hanya menjadi tempat penyimpanan angklung saja.

Data ini akan disampaikan melalui Kemendikbud, tentang kewenangan SMK/ SMA yang diserahkan ke Provinsi maka secepatnya hal ini harus segera diselesaikan secara administrasi serta P2D (Penyerahan Perlengkapan dan Dokumentasi) harus rampung pada akhir tahun ini. Berdasarkan data Dapodik dari Kemendikbud kerusakan merata diseluruh Indonesia, tidak hanya diluar Pulau Jawa, di Pulau Jawa pun masih banyak kerusakan yang serius. ■

(obs.rp), Foto: Chastiti/br

## Komisi IV Sayangkan Hasil Produksi Pasca Panen Tidak Digarap Petani

Komisi IV DPR RI menyayangkan produksi pasca panen tidak digarap oleh petani, tetapi diserahkan kepada perusahaan lain. Padahal, proses-proses meningkatkan kesejahteraan petani sesungguhnya ada pada pasca panen.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat memimpin kunjungan spesifik meninjau budidaya jagung Gorontalo pasca panen di gudang PT Harim yang terletak di Desa Isimu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Selasa 25/10.

Menurutnya, jagung yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pertanian memang telah menjadi budidaya yang produktif di Gorontalo, dengan peningkatan yang sangat signifikan di tiap tahunnya. Hanya saja bagaimana penanganan setelah panen yang masih harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

"Kita harus mendorong keberadaan koperasi petani jagung, sehingga pasca panen tidak hanya dikuasai oleh



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau Gudang PT Harim di Kabupaten Gorontalo

korporasi, tapi ada koperasi yang mampu memproses hingga siap dikirim ke pabrik pakan menjadi *benefit* tambahan bagi petani," jelas Herman.

Jagung yang ada di gudang perusahaan

ternak, maka bisa langsung dikuasai dari mulai budidaya, panen, masuk ke penggudangan atau pengeringan yang kesemuanya dimiliki oleh petani melalui koperasi," pungkasnya. ■

Korea Selatan ini umumnya mempunyai kadar air di bawah 18%, yang merupakan kondisi terbaik untuk dapat menjadi bahan baku yang dibutuhkan pabrik pakan ternak Jakarta dan Surabaya. "Semestinya kalau petani punya gudang dan *network* produsen pakan

(reg), Foto: Rizka/br

## Pemerintah Diharap Konsisten Membangun Kedaulatan Pangan

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menilai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengalami pengembangan, dalam proses mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Meski tidak banyak namun fondasinya sudah ada. Ini bisa menjadi bekal untuk kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Jika pembangunan sektor pertanian konsisten dan progresif maka cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud.

Said memprediksi infrastruktur pertanian yang telah dibangun pemerintah akan berdampak positif pada perekonomian pangan di tahun ketiga

dan tahun keempat.

"Kedaulatan pangan kita, karena infrastruktur sudah dikebut sedemikian rupa maka dampak ekonominya akan luar biasa, itu pasti. Dampaknya memang tidak langsung pada masa tahun pertama dan tahun kedua tapi akan dirasakan di tahun ke tiga dan tahun ke empat," papar Said, di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II, DPR RI, Jakarta, belum lama ini.



Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah

Said optimis, jika pembangunan sektor pertanian menunjukkan progresifitasnya dan konsisten, maka di tahun pemerintahan yang akan datang bisa terasa hasil yang menggembirakan.

"Yang pertama, memang dua tahun pemerintahan itu terlalu pendek jangka waktunya. Akan tetapi pemerintahan

Jokowi Jusuf Kalla ini telah meletakkan pondasi yang kuat untuk kita *take off* di tahun ketiga atau tahun keempat," papar Said.

Karena komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah dan DPR RI telah menaikkan anggaran pertanian sebesar 200 persen. Diharapkan dengan

kenaikan anggaran tersebut cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud di tahun pemerintahan ketiga atau keempat.

"Termasuk seperti pertanian, anggarannya sedemikian rupa, naik 200 persen dan saya yakin pada tahun ketiga dan keempat kedaulatan pangan kita akan mulai mendekati kenyataan." harap Said. ■

(foto/eko), Foto: Jurnalis/br

## Komisi X Setujui Anggaran Kemenpora dengan Sejumlah Catatan

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, Komisi X DPR RI dapat menyetujui pagu definitif dan rincian RAPBN TA 2017 di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3,141 triliun, namun dengan sejumlah catatan atau permintaan.

Pagu definitif Kemenpora akan dialokasikan ke Sekretariat Kementerian sebesar Rp292 miliar, Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar Rp135 miliar, Rp319 miliar untuk Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Deputy Pembudayaan Olahraga sebesar Rp430 miliar, dan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar Rp1,962 triliun.

"Komisi X meminta Kemenpora menyusun kembali skala prioritas (*refocusing*) program/kegiatan yang diusulkan pada RAPBN TA 2017 dengan memperhatikan rencana strategis, RKP, indikator dan evaluasi target yang telah dicapai, dan sasaran yang lebih nyata kebermanfaatannya untuk masyarakat," kata Riefky, membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan Menpora Imam Nahrawi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Selain itu, masih kata Riefky, Komisi X meminta Kemenpora berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kementerian dan Lembaga lain terhadap pembinaan siswa yang prestasi di bidang olahraga, termasuk pula berkoordinasi dengan kegiatan olahraga siswa-Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.

"Komisi X juga meminta Kemenpora menyusun data pokok keolahragaan, dan neraca keolahragaan yang berfungsi sebagai peta prestasi atlet dan perencanaan



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya

penyusunan program/kegiatan olahraga secara berjenjang," imbuh politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya diketahui, pagu anggaran Kemenpora tahun 2017 sebesar Rp2,750 triliun, kemudian dikurangi realokasi pengurangan pagu Rp74 miliar. Namun kemudian mendapat tambahan belanja prioritas Rp465 miliar, sehingga anggaran menjadi Rp3,141 triliun. Terhadap tambahan anggaran total sebesar Rp390 miliar itu, Kemenpora mengusulkan alokasi anggaran untuk beberapa program yaitu Olympic Centre, Sport Science, dan alat Olahraga. Terkait hal ini, Komisi X meminta Kemenpora menyampaikan rekapitulasi di masing-masing Asisten Deputi.

Dalam rincian pagu definitif RAPBN TA 2017 Kemenpora RI itu di dalamnya termasuk anggaran INASGOC dan

INAPGOC sebesar Rp75 miliar, persiapan Asian Paragames 2018 sebesar Rp11 miliar, Rp500 miliar untuk Satlak Prima, Tes Even Asian Games XVIII di 2017 yang menjadi bagian di INASGOC, SEA Games 2017 di Malaysia untuk 28 cabang dengan jumlah 200 Atlet, dan anggaran rutin diantaranya KOI, KONI, SOI, FORMI, dan NPC.

Menpora menyampaikan, anggaran INASGOC untuk Asian Games XVIII yang baru teranggarkan sebesar Rp70 miliar dari usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,8 triliun sehingga belum teranggarkan di Kemenpora RI sebesar Rp2,730 triliun. Kekurangan anggaran sebesar Rp2,730 triliun untuk INASGOC tersebut akan dipenuhi melalui dana BA BUN, dan INASGOC akan menjadi satker tersendiri.

"Terhadap penjelasan Menpora RI bahwa INASGOC akan menjadi satker tersendiri, Komisi X meminta Kemenpora untuk menyampaikan penjelasan tertulis secara komprehensif kepada Komisi X, seperti payung hukum, status kelembagaan, mekanisme penganggaran-penggunaan dan pengawasan, serta posisi DPR RI terhadap INASGOC yang menjadi satker tersendiri," jelas Riefky.

Sementara terhadap program beasiswa prestasi, lanjut Riefky, Komisi X meminta Kemenpora agar diberikan kepada pemuda yang memiliki prestasi non akademik dan melakukan rasionalisasi anggaran program beasiswa prestasi.

"Terkait beasiswa prestasi, agar tidak disalurkan kepada perorangan tetapi disalurkan kepada lembaga kepemudaan secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel," pesan politisi asal dapil Aceh itu. ■

(g), Foto: Kremo/br

## Plus Minus Dua Tahun Pemerintahan Jokowi Jadi Sorotan

Ini yang mengemuka dalam diskusi mingguan Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Kamis (20/10), dengan tajuk Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi. Hadir sebagai pembicara Fadli Zon (F-Gerindra), Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan), M. Qodari (pengamat politik), dan Enny Sri Hartati (peneliti INDEF).

**M**enurut Maruarar, sektor ekonomi sudah berjalan baik. Ini terlihat dari APBN-P yang sejak tahun 2015 berjalan sesuai yang diharapkan. UU Pengampunan Pajak yang ketua Panjanya dari F-Gerindra, kini sudah berjalan baik. Stabilitas politik relatif terjaga dengan tidak ada lagi benturan hebat seperti di awal pemerintahan. Sementara di sektor hukum, Presiden Jokowi sudah mencanangkan bebas pungli. Ini sudah capaian yang luar biasa.

Apalagi angka pengangguran, lanjut Maruarar, terus berkurang dari 5,8 menjadi 5,5 persen. Infrastruktur terus gencar dibangun di berbagai daerah. Bunga KUR bisa sangat rendah yang belum pernah dicapai di era pemerintahan sebelumnya. Dan paket ekonomi pun berjalan, walau tidak semuanya efektif.

Berbeda dengan Maruarar, Fadli justru menilai sebaliknya. Dari pantauannya saat berkunjung ke banyak daerah, dua hal yang selalu dirasakan sulit oleh masyarakat adalah hidup semakin sulit dan mencari pekerjaan juga demikian. Belum ada lapangan pekerjaan baru saat ini. Angka-angka fantastis yang diklaim pemerintah, tidak bersesuaian dengan fakta yang ada. Di bidang ekonomi, Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan mencapai 7 persen. Tapi hingga kini, masih di angka 5,8 persen.

Soal tenaga kerja, sangat ironis ketika pemerintah justru mendatangkan para buruh kasar dari Tiongkok yang sesungguhnya bisa dikerjakan oleh buruh di dalam negeri. Pada bagian lain, janji presiden ingin mengambil alih Indosat,



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota DPR RI Maruarar Sirait dan sejumlah peneliti

hingga kini tak terealisasi. Dan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, masih sebatas gagasan yang tak terwujud. Begitu pula membangun tol laut dari Aceh hingga Papua tak terlihat realisasinya.

Di bidang infrastruktur, pemerintah hanya gencar membangun di darat, tidak di laut. Ditambahkan Wakil Ketua DPR RI ini, banyak seruan presiden sebetulnya sangat baik. Misalnya, soal menurunkan harga daging di bawah Rp80 ribu. Tapi, lagi-lagi tak terwujud. Yang terjadi justru daya beli dan nilai tukar petani mengalami penurunan. "Impor pangan masih merajalela dan kedaulatan pangan tidak ada sama sekali. Semua produk pangan seperti beras, gula, hingga garam pun masih diimpor," keluh Fadli.

Sementara Qodari melihat, bidang infrastruktur, kesehatan, dan pemberantasan narkoba mendapat nilai positif. Tapi, soal lapangan kerja, harga sembako, dan kemiskinan dapat nilai negatif. Namun, Qodari segera menambahkan, baru kali ini ada presiden yang berani menetapkan satu harga BBM

di Papua. Penetapan harga BBM yang seragam ini belum pernah terjadi di era presiden sebelumnya.

Terakhir, analisis ekonomi Enny berpandangan, makroprudential masih terjaga, walau semu. Begitu pula angka pertumbuhan yang masih terjaga. Diakui Enny, angka pertumbuhan yang sudah mencapai di atas 5 persen sebenarnya sudah cukup, tapi belum menguatkana

perekonomian nasional.

Sementara mencermati angka pengangguran, memang, menurun. Namun, penurunan itu diikuti pula dengan menurunnya angkatan kerja baru. "Banyak calon pekerja yang memutuskan melanjutkan pendidikan, karena belum mendapat pekerjaan. Inilah yang harus dicermati," ujar Enny. Ini artinya, angka pengangguran terbuka menurun, tapi angka pengangguran terselubung meningkat. ■

(sc), Foto: Andri/bbr



Suasana sidang ASGP di Jenewa Swiss

## Komisi VI Tegur Menkeu Soal Kewenangan Bahas PMN

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005, pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) berada dalam ruang lingkup kewenangan Komisi VI DPR RI. Hal ini ditekankan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Deputi BUMN.

Azam menilai langkah Sri tidak tepat, karena telah menghadiri rapat kerja tentang suntikan dana ke BUMN atau Penyertaan Modal Negara (PMN) di Komisi XI beberapa waktu lalu. "Jadi semua aturan itu harus dibaca semua. Ini kekeliruan," tegur Azam saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan yang mewakili Menteri BUMN, Jakarta, Kamis (20/10).

Sebenarnya Komisi VI sudah menyetujui dana PMN BUMN dan sudah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI Rp54 triliun untuk 24 BUMN. Dana itu sudah masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Namun, beberapa waktu lalu Komisi XI mengundang Menteri Keuangan untuk membahas PMN empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Krakatau Steel, dan PT Pembangunan Perumahan senilai Rp9 triliun. Dasar hukumnya yakni PP Nomor 41 Tahun 2003.

Menanggapi peringatan tersebut Sri menjelaskan pada dasarnya, dia menghormati semua undangan komisi dan tidak mau memperkeruh suasana antar komisi. Ia mengatakan berusaha menindaklanjuti seluruh undangan yang dilakukan secara resmi.

"Saya tidak tahu bakal bahas ini, tapi



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana

izinkan saya jawab. Saya menghormati seluruh pimpinan, jadi seluruh lembaga-lembaga atau alat kelengkapan yang dituntut menjalankan legislatif. Saya menghormati pada komisi yang menjadi wakil rakyat," ujar Sri di ruang sidang Komisi VI.

Pasalnya, mitra Komisi VI untuk melakukan pembahasan PMN adalah Kementerian BUMN. Selain itu, Azam menilai pembahasan PMN 2016 telah tuntas dan tidak perlu menunggu lampu hijau dari Komisi XI untuk bisa dicairkan.

"Bukan masalah dibahas di Komisi VI atau di Komisi XI, ini soal aturan. Silakan baca aturan Undang-Undang," ujar Azam mengingatkan, Sri.

Komisi VI menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Wakil Pemerintah telah salah komisi untuk menyepakati PMN BUMN tersebut. Pembahasan soal itu seharusnya dilakukan pemerintah dengan Komisi VI.

Azam juga mempertanyakan alasan Menteri Keuangan membahas PMN dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI. "Kami ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya," tanya Azam.

Sejumlah anggota Komisi VI juga turut mempertanyakan tindakan Sri Mulyani. Bahkan ada yang menganggap langkah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sebagai upaya memperumit masalah di DPR RI. ■

(foto), Foto: Kemi/br

## Sekjen DPR RI Hadiri Sidang ASGP di Jenewa

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menghadiri Sidang *Association of Secretaries General of Parliaments* (ASGP) di Jenewa Swiss pada 23-27 Oktober 2016. Hal ini sebagai wujud peran DPR RI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum Internasional.

ASGP merupakan organisasi dibawah *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yang memberikan forum kepada para Sekretaris Jenderal Parlemen di seluruh dunia untuk saling berbagi pengalaman dan informasi guna meningkatkan pelayanan Setjen kepada para Anggota Parlemen, dan standar pelayanan prima Setjen parlemen seluruh dunia.

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh Sekjen DPR RI juga dihadiri oleh sejumlah 60 Sekjen

dari 150 parlemen anggota IPU. Kegiatan ini pun diharapkan dapat mempererat hubungan antar parlemen dalam menyikapi tuntutan dan tantangan global yang semakin berat.

Sekjen DPR RI pada tanggal 24 Oktober 2016 telah menyampaikan presentasi yang berjudul "Peran Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Badan Musyawarah untuk meningkatkan kinerja DPR RI lebih efektif." Sebagaimana Musyawarah untuk meningkatkan kinerja DPR RI lebih efektif." Sebagaimana Anggota ASGP *Executive Committee* periode 2014-2017. ■

(foto), Foto: Dok.BKSA/PR

## RUU BUMN Belum Terjemahkan 'Hajat Hidup Orang Banyak'

RUU BUMN yang kini sedang dibahas belum sepenuhnya mampu menerjemahkan sekaligus menerapkan amanat konstitusi atas pengertian hajat hidup orang banyak yang tertera dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Banyak cabang produksi nasional justru kini diserahkan ke pasar.

Demikian mengemuka dalam diskusi mingguan Forum Legislasi yang membincang RUU BUMN di Media Center DPR RI, Selasa (25/10). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Hekal dan Analis Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Selama ini, pemerintah banyak menyerahkan sumber-sumber produksi nasional seperti energi dan pangan ke pasar bebas. Dan RUU BUMN yang kini sedang dalam pembahasan Komisi VI harus mampu mengendalikan semua ini.

Hekal menjelaskan, RUU yang sudah hampir tiga tahun belum rampung ini, masih terbentur pada perdebatan politik antar fraksi. Namun secara substansi, kritik Ichsanuddin disambut baik Hekal bahwa RUU BUMN belum mengimplementasikan sepenuhnya hajat hidup orang banyak tersebut pada operasional BUMN.

"RUU BUMN ini masih alot dibahas. Apalagi hingga kini keberadaan Menteri BUMN di DPR RI tidak jelas. Ini

berdampak pada RUU BUMN yang sedang dibahas. Pimpinan DPR RI perlu andil memberi solusi," kata Hekal. Ditambahkan Anggota F-Gerindra ini, RUU BUMN juga tak bahas *holding* BUMN yang kini sedang diwacanakan pemerintah dengan membentuk *super holding*. Bila *super holding* jadi dibentuk, itu bisa menutup peran Kementerian BUMN.

Sementara Ichsanuddin melihat, rencana pemerintah yang ingin bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP) bisa menghilangkan peran BUMN. Bahkan, dengan TPP itu, ekonomi negara diserahkan sepenuhnya pada kapitalisme. Hingga kini, masih sulit menjadikan BUMN sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Indonesia, kata Ichsanuddin, perlu mencontoh Cina yang sangat kuat BUMN-nya. Semua



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Hekal bersama Analis Ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam Forum Legislasi

sumber produksi strategis dikuasai negara lewat BUMN.

Ichsanuddin berharap, dengan mencontoh Cina, BUMN di dalam negeri bisa menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Di sinilah pentingnya mengimplementasikan pengertian hajat hidup orang banyak ke dalam RUU BUMN. Ini, sambung Ichsanuddin, bisa jadi kunci RUU BUMN. ■

(60) Foto: Ranti/br

## Komisi III DPR RI Merasa Dibohongi Mantan Kapolda Riau

Komisi III DPR RI merasa dibohongi oleh Mantan Kapolda Riau, Brigjen Pol. Supriyanto terkait keluarnya SP3 (Surat penghentian penyidikan perkara) kasus Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tersebut. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Mantan Kapolda Riau, Irjen Pol. Dolly Bambang Hermawan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (25/10).

“Sebelumnya saat RDP dengan Kami (Komisi III-red) Mantan Kapolda Riau Supriyanto sempat memberikan keterangan bahwa keluarnya SP3 terhadap tersangka kasus kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu ada terjadi pada masa kepemimpinan Kapolda Riau sebelumnya (Dolly Bambang H-red). Namun setelah hal itu ditanyakan

kepada Kapolda sebelumnya, Dolly membantahnya. Jadi Kami merasa dibohongi,” ungkap anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw.

Pada kesempatan itu Mantan Kapolda Riau sebelumnya, Dolly Bambang Hermawan menjelaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya Polda Riau menangani 18 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari 18

kasus tersebut, tiga diantaranya telah diterbitkan SP3 oleh Polres Pelelawan, Riau, dua Kasus ditangani Polda Riau dan telah masuk proses peradilan.

Dua kasus tersebut dengan tersangka PT Langgam Inti Hibrido (LIH) dan PT PLM (Palm Lestari Makmur). Sementara tiga kasus yang telah diterbitkannya SP3 dengan tersangka KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Raya Pelelawan dan PT Parawira. Terbitnya SP3 atas kasus tersebut, meski ditangani oleh Polres Pelelawan, namun sebagai bentuk pengawasan menurut Dolly, Polda Provinsi Riau juga telah melakukan gelar perkara.

“Berdasarkan masukan para ahli, yakni Prof Alfie dari USU, dan ahli lingkungan hidup (BLH), diketemukan kesimpulan bahwa apa yang dilakukan ketiga korporasi tersebut tidak cukup memenuhi unsur pidana. Dengan demikian layak diterbitkan SP3,”

## Terancamnya Habitat Orangutan Harus Mendapat Penanganan Serius

Keberadaan orangutan terancam akibat dari kerusakan habitat orangutan karena kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan. Habitat orangutan yang rusak, membuat orangutan keluar dari habitatnya, sehingga hal inilah yang mengancam keselamatan orangutan itu sendiri. Penanganan orangutan harus dilakukan secara serius.

Demikian diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani, usai meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS, di desa Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/10). Yayasan BOS merupakan organisasi non profit yang didedikasikan untuk konservasi orangutan dan habitatnya.

"Kita lihat untuk konservasi orangutan ini perlu penanganan secara serius. Orangutan itu bisa sakit karena diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang memanfaatkan lahan yang menjadi habitat orangutan. Bahkan, orangutan bisa terbunuh akibat dari rusaknya habitat," kata Hamdhani.

Politisi F-Nasdem itu menyoroti masyarakat yang melakukan tindakan



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI menyerahkan cenderamata kepada pengelola Yayasan BOS

sendiri dalam menangani orangutan, sehingga menyakiti bahkan membunuh orangutan itu. Ia meminta dengan tegas, seharusnya masyarakat yang membuka lahan, harus berkoordinasi dengan petugas BKSDA untuk melakukan tembakan bius, kemudian orangutan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk diamankan atau dipindahkan ke habitat yang baru.

jas Dolly dalam Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Melihat dua penjelasan yang berbeda dari mantan dua Kapolda Riau tersebut, maka menurut Wenny Komisi III DPR RI akan segera mengundang kembali keduanya, namun dalam waktu dan kesempatan yang sama dengan didampingi oleh Kabareskrim Mabes Polri. Ia berharap dengan mengundang ketiganya akan ditemukan titik terang yang menjadi dasar terbitnya SP3 atas kasus Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Riau.

"Kalau mau disebut dikonfrontir ya silahkan, namun yang pasti kami akan kembali mengundang kedua mantan Kapolda Riau ini secara bersamaan dengan didampingi oleh Kabareskrim. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran

tentang kasus terbitnya SP3 beberapa waktu yang lalu. Jadi sangat jelas, ini untuk kebenaran," pungkas Mantan Dir II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri yang kini menjadi Politisi dari Fraksi Partai Gerinda. ■

(ayu), Foto: Arnie/br



Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw

"Kepunahan dari salah satu satwa primata ini sudah mulai terasa, karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga habitat dan keberadaan orangutan. Perhatian malah datang dari warga asing yang selalu ingin menjaga orangutan, sehingga mereka menjadi donatur untuk konservasi orangutan," imbuh Hamdhani.

Politisi asal dapil Kalimantan Tengah itu memastikan, berbagai masukan yang didapatkan ini, akan segera untuk ditindaklanjuti. Terutama kepada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait perlindungan orangutan, sehingga spesies ini tetap terjaga.

"Perlu disediakan kawasan-kawasan khusus, agar habitat orangutan tidak terganggu, dan tetap dapat hidup di habitatnya. Bukan hanya untuk orangutan, tapi juga spesies-spesies lain. Kelestarian orangutan menjadi tanggung jawab bersama, agar mereka tidak punah," pesan Hamdhani.

Sebelumnya, Program Manajer Yayasan BOS Nyaru Menteng, Deny Kurniawan mengatakan, saat ini jumlah orangutan di Yayasan BOS mengalami *over* populasi. Karena daya tampung pusat rehabilitasi hanya untuk 320 orangutan, sementara saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan.

"Padahal, Indonesia sudah memiliki Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, yakni Permenhut Nomor P.53/Menhut-IV/2007. Permenhut ini menekankan bahwa pada tahun 2015, tidak ada lagi hutan yang direhabilitasi. Namun sekarang malah *over* populasi," jelas Deny.

Deny memaparkan, selama ini sebanyak 185 orangutan telah dilepasliarkan ke hutan alami, meliputi 167 ekor di Hutan Lindung Bukit Batikap, dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. ■

(gf), Foto: Sofyan/br

## Tim Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X Temukan Sekolah Terbakar di Kendari

Tim Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Menengah (Panja Sarpras Dikdasmen) Komisi X DPR RI menemukan gedung sekolah dasar yang terbakar sejak Februari 2016, namun hingga saat ini belum juga direnovasi karena anggaran renovasi baru cair pada Tahun 2017 akibat lambannya penanganan dari pihak terkait.

**H**al tersebut dikemukakan Ferdiansyah selaku Ketua Tim Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI saat melakukan tinjauan lapangan ke Sekolah Dasar Negeri 01 Poisai Kendari, Sulawesi Tenggara, Jum'at (21/10). Dirinya mengaku prihatin melihat kondisi gedung SD yang rusak berat akibat kebakaran hampir setahun silam, namun belum juga diperbaiki hingga saat ini akibat kurang sigapnya respon dari para pemangku kepentingan.

"Ini bagian dari tujuan dibentuknya Panja Sarpras Dikdasmen bahwa kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan sejauh mana tingkat kerusakan gedung sekolah apakah ringan atau berat, apakah hanya perlu renovasi, kebutuhan akan ruang kelas baru serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti perpustakaan, laboratorium dan lain-lain," ungkap politisi Golkar ini.

Selain gedung yang rusak parah karena terbakar, SDN 01 Poisai juga baru memiliki 4 WC (toilet) yang kondisinya cukup memprihatinkan dan



*Tim Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI meninjau SDN 01 Poisai Kendari*

digunakan oleh para guru dan murid yang jumlahnya kini mencapai ribuan siswa. Tak berbeda pula dengan kondisi ruang perpustakaan, dengan jumlah murid ribuan ternyata sekolah dasar ini hanya memiliki sebuah perpustakaan dengan ukuran sekitar 50m persegi.

Usai menunaikan shalat Jum'at, Tim Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X melanjutkan peninjauan ke SMP Negeri 05 Kendari. Di sekolah ini Tim melihat langsung kondisi ruang kelas dengan lantai berbahan tegel (belum dikeramik) banyak yang terkelupas, kursi patah karena

dimakan rayap serta papan tulis yang tidak menggunakan *white board* melainkan beberapa keramik putih yang dipasang ditembok sebagai gantinya.

"Semua temuan yang kita lihat langsung akan menjadi bahan bagi Tim Panja Sarpras dalam menyusun standarisasi sarana dan prasarana yang harus dimiliki dari sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di seluruh Indonesia, dan Tim ini melakukan kunjungan ke

beberapa provinsi secara acak untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya," jelas Politisi Dapil Jabar XI ini.

Tim Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI dipimpin Ferdiansyah (Wakil Ketua/Golkar), Sofyan Tan (PDIP), Marlinda Irwanti (Golkar), Ida Bagus Putu Sukarta (Gerindra), Anang Hermansyah (PAN), Lathifah Shohib (PKB), Sohiful Iman (PKS), Kresna Dewanata Phrosakh (Nasdem), Nuroji (Gerindra) dan Jamal Mirdad (Gerindra). ■

(foto: Nafjngji/hr)

## Anggaran Kesehatan Sudah Penuhi Amanat UU, Tapi Minim Capaian

Dua tahun Pemerintahan Jokowi di bidang kesehatan dapat sorotan. Sesuai amanat UU Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen sudah terpenuhi. Tapi, sayangnya tak diikuti dengan capaian yang membanggakan di sektor ini.

**D**emikian diutarakan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Senin (24/10). "Alokasi anggaran kesehatan di era Pemerintahan Jokowi telah memenuhi amanat UU, yakni melebihi angka 5 % dari APBN atau mengalami kenaikan sebesar

182 persen dari anggaran sebelumnya. Hal ini tentu patut kita apresiasi. Namun, besaran anggaran kesehatan sayangnya tidak berbanding lurus dengan capaian di bidang kesehatan."

Politisi PPP ini mencontohkan, angka anak pendek karena kekurangan gizi (stunting) sudah mencapai 30 persen.

Padahal, merujuk WHO, angka ideal mestinya di bawah 20 persen. Laju pertumbuhan penduduk juga terus meningkat. Mestinya, kata Okky, jika tahun 2030 Indonesia ingin memaksimalkan bonus demografi, maka syarat utama penduduknya harus sehat. Ini harus segera diatasi.

Kementerian Kesehatan, nilai Okky,

masih memiliki banyak tunggakan aturan turunan pelaksana UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang belum dituntaskan. Seperti PP dari UU Kesehatan Jiwa, PP UU Rumah Sakit khususnya RS yang menolak pasien, dan PP Dokter Layanan Prima (DLP) seperti diamanatkan UU Pendidikan Kedokteran. "Sejumlah utang regulasi tersebut mengakibatkan kerja sektor kesehatan Pemerintahan Jokowi tidak maksimal. Presiden harus mengontrol para pembantunya agar bergerak cepat dalam kerja legislasi," seru Okky.

Ditambahkan Sekretaris Dewan Pakar PPP ini, dengan anggaran yang meningkat, mestinya Kemenkes punya banyak terobosan kebijakan. Penempatan dokter/tenaga kesehatan di luar Jawa hingga kini masih

bermasalah. Faktanya, ada disparitas dokter/tenaga kesehatan antara Jawa dan Luar Jawa. Dan program "Nusantara Sehat" yang digulirkan pemerintah, kini sepi peminat.

Pada bagian lain, Okky mendorong Kemenkes gencar melakukan penelitian dan pengembangan dengan melibatkan universitas dan perusahaan swasta terkait dengan pemberdayaan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan produksi obat-obatan. Sektor ini belum digarap serius. Padahal, Indonesia sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan herbal.

Dalam layanan BPJS Kesehatan, juga masih banyak ditemukan pasien ditolak RS. "Ini salah satunya karena paket INA CBGs (sistem pembayaran dengan

sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita) yang dinilai tidak menguntungkan RS.

"Pemerintah mestinya melakukan terobosan. Misalnya dengan memberi insentif pajak bagi RS yang menjadi mitra BPJS," papar Okky. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

## Komisi V DPR RI Tetapkan RKAK/L RAPBN Tahun 2017 Mitra Kerjanya

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian PDT, BMKG, BNPP, BPLS dan BPWs, dengan agenda penetapan rencana kerja anggaran RAPBN tahun anggaran 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

“ Hari ini kita mensahkan anggaran besar Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V, yang selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI. Kami berharap, hal-hal yang telah disampaikan dalam rapat bersama dengan mitra kerja Komisi V, dapat menjadi komitmen bersama,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis.

Fary yang memimpin jalannya raker tersebut mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya penyempurnaan alokasi anggaran tersebut. Persetujuan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama 10 fraksi di Komisi V, 9 diantaranya menyatakan setuju dan 1 fraksi yakni Gerindra tidak menyampaikan pendapat atau abstain.

"Kementerian mitra kerja kita akan menyusun lebih detil tentang kegiatan-kegiatan program di masing-masing daerah, untuk itu kita akan mengagendakan kembali RDP dengan para eselon 1 untuk memastikan apakah usulan-usulan program, baik pada saat kunjungan kerja maupun di



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis.

daerah pemilihan masing-masing anggota dewan sudah dimasukkan dalam pembahasan berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, dari total alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp101,496 triliun, terbagi ke dalam 11 unit kerja, yakni Sekretariat Jenderal Rp569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp15,935 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp33,263 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp8 triliun,

Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp240 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Rp632 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp478 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut beberapa target pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pada 2017 mendatang antara lain di bidang kedaulatan pangan atau ketahanan air yaitu

pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 4,18 meter kubik per detik, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 274.000 hektar, 39 bendungan (9 baru dan 30 lanjutan), membangun 105 embung-embung, serta 81.000 pembangunan jaringan irigasi. ■

## Bakri Harap Hasil Kunspek Komisi V DPR RI Bantu Pembangunan Kab. Bungo

Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri dapil Jambi berharap hasil kunjungan Komisi V DPR RI betul-betul bisa dijadikan satu usulan untuk kelanjutan pembangunan di Provinsi Jambi, khususnya Muara Bungo.

Hal tersebut diungkapkan, Bakri kepada Parleментарia, disela-sela kunjungan Komisi V DPR RI meninjau sejumlah infrastruktur perhubungan di Kabupaten Bungo, Kamis, (27/10).

“Ada beberapa kegiatan yang ditinjau Komisi V DPR RI, seperti jembatan, beberapa jalan nasional, bandara, dana desa, irigasi. Untuk itu kita berharap bahwa hasil kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Muara Bungo ini, akan bisa membantu perekonomian Muara Bungo kedepannya,” kata Bakri.

Bakri menjelaskan, sebelumnya, pada Rabu malam (26/10), saat Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati Bungo Mashuri beserta jajaran, dan perwakilan kementerian mitra kerja Komisi V, dimana dirinya mengharapkan agar semua bisa bekerja sama baik pusat maupun provinsi dan kabupaten, agar seluruh kegiatan-kegiatan yang direncanakan di Provinsi Jambi, khususnya Muara Bungo dapat terwujud dalam waktu secepat mungkin.

Ketika ditanya, kaitannya dengan adanya pemotongan anggaran oleh pusat,

Bakri ingin agar infrastruktur yang betul-betul menyentuh seperti dana desa, jalan lingkungan, air bersih jangan dikenakan pemotongan.



*Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat meninjau sejumlah infrastruktur perhubungan di Muara Bungo*

“Kalau toh memang infrastruktur-infrastruktur yang besar, yang diupayakan oleh pemerintah, kalau bisa dikelola maupun dicarikan dananya baik melalui luar negeri ataupun swasta kita upayakan. Tapi jangan sampai infrastruktur-infrastruktur yang perlu subsidi riil dari anggaran APBN jangan sampai tersentuh, karena kalau sampai tersentuh, saya yakin dan percaya bahwa perkembangan ekonomi

kebawah pasti akan terpengaruh sampai kedesa-desa,” tegas politisi PAN ini.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia selaku ketua tim rombongan menjelaskan, kunjungan spesifik Komisi V DPR RI atas permintaan Kab. Bungo, dimana pemda Bungo ini merupakan pemda yang berada ditengah-tengah Sumatera, baik itu dari barat timur utara dan selatan. “Ini merupakan lintasan yang cukup strategis,” ujar Yudi.

Untuk diketahui, pada Kamis (27/10) Tim Kunspek Komisi V DPR RI melakukan sejumlah peninjauan ke sejumlah infrastruktur perhubungan. Infrastruktur yang dimaksud adalah Jembatan Batang Bungo, Jembatan Batang Tebo, Bandara Muara Bungo, dan sekaligus memantau penyerapan anggaran dana desa.

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI diikuti pula oleh Sadarestuwati (F-PDIP), Ade Rezki Pratama (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-PD), A. Bakri HM (F-PAN), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Fatmawati Rusdi (F-PPP), Sahat Silaban (F-Nasdem), dan Capt. Djoni Rolindrawan (F-Hanura). ■

(nt), foto : smut/hr

## Anggota Panja Karhutla Komisi III DPR RI Kritik Kabareskrim

Anggota Panja Kebakaran hutan dan lahan Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mengkritisi mitra kerjanya, Polri terkait keluarnya SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) Kebakaran Lahan dan hutan. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Karhutla Komisi III DPR RI dengan Kabareskrim Mabes Polri, Ari Dono, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (24/10).

“Paparan Kabareskrim tentang Kasus Kebakaran hutan dan Lahan yang terjadi pada tahun 2015 itu menurut saya tidak *logic*. Misalnya tentang banyak kejadian kebakaran

terjadi di lahan perusahaan, namun dilakukan oleh masyarakat umum. Ini kan tidak mungkin, Kita punya lahan kemudian membiarkan orang lain membakar di lahan kita. Ini hanya

sebuah bentuk justifikasi atau pembenaran saja,” papar Erma.

Dalam kasus itu pun Erma melihat kelemahan dari penyidik baik di Mabes Polri maupun di Polda yang tidak



Anggota Panja Kebakaran hutan dan lahan Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik

mendatangkan saksi ahli yang kompeten di bidangnya dengan alasan biaya. Seperti beberapa waktu saat Komisi III menggelar RDP dengan Kapolda diketahui bahwa untuk kasus besar, kebakaran hutan ini pihaknya hanya mengundang sarjana kesehatan masyarakat sebagai saksi ahli. Hal ini sangat disayangkan mengingat masih banyak saksi ahli kehutanan dan lingkungan lainnya yang bisa diambil keterangannya. Oleh karenanya, Erma berharap agar Polri mengalokasikan anggaran untuk membiayai Polda dan Kabareskrim dalam menghadirkan saksi ahli yang kompeten di bidangnya.

Tidak hanya itu, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini juga berharap agar Polri membuat suatu unit khusus untuk kasus kejahatan lingkungan, dan

kebakaran hutan dan lahan. Perlu keahlian khusus untuk melakukan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan seperti harus bisa baca satelit, harus bisa membaca titik-titik GPS dan sebagainya. Pasalnya, Presiden juga sempat menegaskan tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu Erma juga berharap agar Polri jangan banyak mengeluh. Terlebih lagi terkait pemberitaan media massa terhadap kasus karhutla yang dinilainya tidak berimbang alias hanya menyalahkan korporasi. Erma menilai bahwa sudah selayaknyalah media massa menjalankan tugasnya sebagai *control social*. Hal ini semata untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Bukan malah anti kritikan. ■

(ayul, Foto:arif/br)

## Legislator Ingin RUU PKS Berikan Perlindungan Psikologis Kepada Korban

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ammy Amalia menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tengah diharmonisasi Baleg saat ini memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual.

“RUU PKS ini menginginkan adanya peran serta negara, baik dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat kabupaten kota agar memberikan perhatian khusus untuk pemulihan korban tindak kekerasan seksual,” ungkap Ammy dalam Rapat Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10).

Menurut politisi dari Fraksi PAN itu, pemulihan psikologis terhadap korban selama ini masih terabaikan. Pasalnya, fokus pemerintah dalam KUHP hanya pada pemidanaan pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan.

Sisi lain, lanjut Ammy, nantinya pemulihan psikologis korban kekerasan seksual akan dilakukan oleh psikolog khusus yang bisa mengobati traumatis tanpa mengabaikan kemampuan negara dalam hal pembiayaan dengan memberikan limitasi waktu.

“Untuk sementara memang wacana baru sampai disitu. Sebetulnya korban



Anggota Baleg DPR RI Ammy Amalia

yang mengalami traumatis butuh waktu berapa lama agar bisa sembuh, nah ini yang akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi,” tandas politisi dapil Jawa Tengah VIII itu.

Selain itu, terkait dengan hak-hak korban, Ammy mengusulkan agar nantinya pengadilan kasus kekerasan seksual dilakukan secara tertutup untuk meminimalisir adanya reviktimisasi terhadap korban.

“Jika memungkinkan, tidak perlu bentuk pengadilan khusus, tetapi pengadilan umum hanya saja dilakukan secara tertutup untuk melindungi hak-hak dan nama baik korban,” imbuh Ammy.

Sementara itu, anggota Baleg Rufinus Hutauruk mengutarakan agar sebaiknya kasus kekerasan seksual masuk kedalam ranah pidana khusus dan persidangannya harus dilakukan secara tertutup. Sebab, hak-hak korban perlu menjadi perhatian dalam RUU PKS ini.

“Mengenai hak korban, saya melihat sangat tidak toleran terhadap korban karena kerahasiaan korban tidak terjaga sama sekali. Seseorang sudah menjadi korban kemudian di *re-shot* di TV, Waduh, berapa kali mereka harus menjadi korban dan itu akan dilegalisasi oleh masyarakat banyak. Ini masalah khusus, jangan sampai masuk dalam ranah pidana umum,” tegas politisi dari F-Hanura itu. ■

(ammy, Foto: Jeyanti/br)

## Dewan Soroti Anggaran Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar

Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir menyoroti besaran anggaran pemasaran pariwisata mancanegara yang diusulkan Kementerian Pariwisata. Menurutnya, anggaran itu masih bisa dirasionalisasikan, sehingga realokasi anggaran bisa dimanfaatkan untuk program yang lain, terutama untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Demikian dikatakannya di sela-sela rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/20). Sebagaimana diketahui, untuk anggaran pemasaran pariwisata mancanegara ini, Kemenpar mengusulkan anggaran sebesar Rp2,071 triliun, kemudian direalokasi sebesar Rp150 miliar, sehingga menjadi Rp1,921 triliun.

"Beberapa kali dalam raker, kami mengharapkan rasionalisasi dari anggaran untuk promosi mancanegara ini. Tetapi ternyata usulan dari Kemenpar sebesar Rp2 triliun lebih itu, hanya kurang Rp150 miliar. Harapan kami lebih dari itu, sesuai dengan hitungan yang kami miliki di Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata," tegas Dony.

Pasalnya menurut politisi F-PPP itu, berapapun anggaran promosi, target tetap tercapai. Hal itu bukan tanpa alasan, Dony sudah melihat data beberapa tahun belakang untuk dijadikan acuan data, terutama data tahun anggaran 2015.

"Oleh karena itulah, kami mengharapkan dengan dasar data tahun 2015, yang hanya memiliki target kunjungan 10 juta wisatawan mancanegara, ternyata cukup dengan anggaran Rp1 triliun. Sekarang pun dengan target kunjungan 15 juta wisman, kalau linear dengan tahun 2015, saya berasumsi di tahun 2017 cukup dengan Rp1,5 triliun," jelas Dony.

Atau, lanjut Dony, jika harus memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya, bisa ditambahkan 10 persen dari Rp1,5 triliun, yakni sebesar Rp150 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1,65 triliun.

"Ini kalau saya melihat data anggaran tahun sebelumnya untuk promosi pariwisata cukup di Rp1,65 triliun pada



Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir

tahun 2017. Dan saya yakin target bisa tercapai di angka 15 juta wisman pada tahun 2017," optimis Dony.

Apalagi, masih kata Dony, untuk melakukan promosi secara keseluruhan bukan hanya dari Kemenpar, namun pelaku pariwisata di Tanah Air juga sudah mempromosikan secara mandiri.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu mencermati, pengembangan destinasi pariwisata juga harus diperkuat dan ditingkatkan. Sehingga, ada keseimbangan antara anggaran promosi pariwisata di mancanegara dengan pengembangan destinasi pariwisata.

"Sekarang belum sebanding. Jadi harus beriringan, tidak jomplang. Jangan sampai promosi jor-joran, tapi destinasi pariwisatanya tidak dioptimalkan. Sehingga wisatawan kapok, dan tidak datang lagi," khawatir Dony.

Setelah melewati proses rapat yang panjang, Komisi X dan Kemenpar menetapkan pagu definitif RAPBN TA 2017 Kemenpar RI sebesar Rp3,823 triliun. Anggaran itu

akan dialokasikan kepada lima unit kerja di Kemenpar, meliputi Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara sebesar Rp1,571 triliun, kemudian anggaran sebesar Rp771 miliar untuk Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.

Berikutnya, anggaran untuk Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebesar Rp347 miliar, disusul anggaran Deputy Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata sebesar Rp814 miliar, dan Rp319 miliar untuk Sekretariat Kementerian Pariwisata. ■

(sf) Foto: Ranti/br

## Perusahaan Pelanggar Aturan Akibat Kerugian Negara

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menegaskan, setidaknya ada 120 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang melanggar berbagai peraturan, namun tetap beroperasi. Ke-120 perusahaan itu mengelola kurang lebih 800 ribu hektar di Kalteng. Akibat dari berbagai pelanggaran aturan, hal ini dipastikan merugikan negara dan masyarakat.

Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan

## DPRD Kabupaten Tanah Datar Konsultasi Tugas dan Fungsi Baleg DPR RI

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Inosentius Samsul menerima DPRD Kabupaten Tanah Datar Prov. Sumatera Barat di ruang rapat Badan Keahlian DPR RI. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait tugas dan fungsi Badan Legislasi yang ada di DPR RI.



Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Inosentius Samsul

Kunjungan mereka dalam rangka melakukan konsultasi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Legislasi yang ada di DPR RI. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Baleg daerah seharusnya sudah dirubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, tapi mereka belum melakukan itu. Maka dalam terkait perubahan-perubahan itu mereka ke sini konsultasi," ujar Inosentius, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10).

Adapun, lanjut Inosentius, mereka juga menanyakan terkait praktek Baleg di DPR RI untuk mereka praktekkan di daerah. Mereka menanyakan bagaimana Baleg menentukan prioritas, bagaimana penyusunan program

peraturan, dan bagaimana penjadwalan pembahasan peraturan hingga penyusunan program legislasi.

"Mereka ingin mengetahui praktek kinerja Baleg yang di DPR RI. Saya jelaskan antara Baleg di DPR RI dan di daerah berbeda terutama setelah Undang-undang nomor 17 tahun 2014 yang mengatakan Baleg sudah tidak memiliki wewenang untuk mengajukan RUU usul inisiatif karena itu di alihkan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kalau di daerah balegnya masih boleh mengajukan peraturan prioritas," katanya.

Selain itu, lanjut Inosentius mereka juga menanyakan terkait maraknya peraturan daerah yang bertentangan dan akan dihapus sekitar 3000. "Mereka menanyakan apa

dasarnya, saya jelaskan hal ini sudah jelas ada dalam UU nomor 23. Di situ dijelaskan kalau ada perda yang bertentangan dengan UU itu akan di batalkan oleh pemerintah pusat," terangnya.

UU Nomor 23 juga mengatakan daerah yang tidak mengikuti rekomendasi akan diberikan sanksi administrasi dan juga sanksi pengurangan dana alokasi dari pusat ke daerah. Artinya UU nomor 23 memang semakin ketat mengatur agar daerah lebih memperhatikan saran dari pemerintah pusat, untuk membatalkan peraturan daerah yang dinilai bertentangan itu. ■

Kehutanan, perwakilan dinas-dinas di lingkungan Pemprov Kalteng, serta direksi perusahaan pelanggar aturan, di Palangka Raya, Kalteng, Rabu (26/10). Pertemuan ini dalam rangka kunjungan spesifik Komisi IV ke Kalteng.

"Berdasarkan laporan di pusat, ada sekitar 120 perusahaan yang dianggap melanggar peraturan, dan menjadi kebun ilegal di Kalteng. Dampaknya sangat buruk. Dengan lahan mencapai 800 ribu hektar, berapa dana reboisasi dan nilai tegakan yang hilang, sehingga tidak masuk ke keuangan negara," tegas Daniel.

Berikutnya, masih kata Daniel, Hak Guna Usaha (HGU) seluas 800 ribu hektar yang dilanggar juga menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah, karena tidak ada pemasukan keuangan negara. Imbasnya, juga merugikan masyarakat, karena minimnya APBD, pembangunan pun menjadi minim. Belum lagi, hampir semua perusahaan itu tidak memenuhi aturan 20 persen kebun plasma untuk petani. Hal itu tentu sangat merugikan petani.

"Plasma menjadi indikator yang kuat, karena plasma itu bukan hanya tanggung

jawab dan kebaikan sosial perusahaan kepada masyarakat, tapi juga perintah undang-undang, wajib hukumnya dijalankan oleh perusahaan," tegas politisi F-PKB itu.

Daniel menambahkan, jika memang perusahaan ini terbukti melanggar peraturan, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah tegas. Selain itu, akan dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Kalau memang benar-benar melakukan pelanggaran, akan kita tindak tegas, bahkan sampai pencabutan izin perusahaan," tegas politisi asal dapil Kalimantan Barat itu, sembari berjanji akan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng menyambut baik kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ini. Ia berharap, dengan adanya dukungan DPR RI untuk menindak

perusahaan pelanggar izin ini, dapat memperkuat langkah yang diambilnya.

"Selama menjabat, saya melihat ada permasalahan yang ada di Kalteng. Sumber-sumber potensi penerimaan asli daerah banyak, tapi Kaltengnya miskin. Masyarakat miskin, bahkan ada perusahaan yang sudah HGU, tapi wilayahnya berada di area hutan," kata Gubernur. ■



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Joban

## Parlemen Timor Leste Bicarakan Tiga Isu Krusial

Tiga isu krusial disampaikan delegasi Parlemen Timor Leste saat berkunjung ke DPR RI. Ditemui Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, tiga isu krusial itu menyangkut dua wilayah perbatasan yang masih disengketakan, makam tokoh Timor Leste yang wafat saat konflik dengan Indonesia, dan keanggotaan penuh di ASEAN.

Demikian mengemuka saat delegasi Parlemen Timor Leste berkunjung pada Kamis (20/10). Dipimpin Virgilio da Costa Hornal, Parlemen Timor Leste menyerukan agar wilayah perbatasan yang masih disengketakan tidak memecah persaudaraan kedua negara. Ada dua wilayah perbatasan yang belum mendapat titik temu soal garis batasnya. Indonesia dan Timor Leste perlu menyamakan persepsi sebelum menyelesaikan garis batas.

Hornal sempat mengundang delegasi DPR RI agar mendatangi wilayah perbatasan yang disengketakan tersebut. Nurhayati sendiri mengatakan, DPR RI sangat konsen dengan isu perbatasan ini. Dan DPR RI sendiri segera membicarakan sengketa perbatasan ini dengan pemerintah.



Suasana pertemuan BKSAP DPR RI dengan Delegasi Parlemen Timor Leste

Isu kedua menyangkut para tokoh pejuang Timor Leste yang wafat di wilayah Indonesia dan hingga kini belum ditemukan makamnya. Mereka wafat saat perang dan konflik terjadi di tahun 1970-an dan 1990-an. Parlemen Timor Leste didesak oleh keluarga para tokoh tersebut untuk segera memulangkan jenazahnya yang mungkin masih ada di Indonesia.

Sementara isu terakhir menyangkut keinginan Timor Leste agar bisa diterima

sebagai anggota penuh ASEAN yang selama ini masih menjadi *observer*. Nurhayati menyatakan, Indonesia sangat mendukung Timor Leste soal ini. "Kami dukung penuh Timor Leste. Di kawasan ASEAN, 40 persen perekonomian ASEAN ada di Indonesia. Walau Indonesia negara besar, tapi kami tidak menempatkan sebagai penguasa, melainkan big brother," ujar Nurhayati.

Pertemuan kedua parlemen ini penuh keakraban dan persaudaraan. Nurhayati bahkan memuji para anggota Parlemen Timor Leste yang masih fasih berbahasa Indonesia. Ini bisa menjadi jalan kemudahan untuk kembali mempererat hubungan kedua negara. Luka lama harus segera dilupakan. Kini, keduanya harus menjalin hubungan yang erat agar kehidupan rakyat di kedua negara juga tidak terganggu. ■

(amb), Foto: Rumi/br

## Ketua BKSAP Terpilih Pimpin Komite IHL IPU

Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf terpilih secara aklamasi untuk memimpin *Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* (Komite IHL) pada pertemuan IPU ke-135, yang digelar di Geneva, Minggu (23/10). Nurhayati terpilih untuk mengisi jabatan Presiden Komite IHL dalam setahun ke depan.

Dia menggantikan S Owais dari Yordania yang sebelumnya terpaksa melepas jabatannya karena tidak terpilih kembali sebagai anggota parlemen pada medio 2016 ini. Pada saat pertemuan berlangsung, Nurhayati mendapatkan dukungan dari para anggota Komite IHL terutama Delegasi dari Mauritius, Swedia, maupun Meksiko.

Sesaat setelah terpilih secara aklamasi, Nurhayati langsung mengambil tampuk pimpinan pertemuan dan segera memimpin jalannya



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam acara IPU ke-135 di Geneva

## Pansus RUU Wasantara Pertimbangkan Masukan Lemhanas

Panitia Khusus (Pansus) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Wawasan Nusantara menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Ketahanan Nasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

“Ini pertemuan yang mengawali pertemuan yang akan datang, masukan yang disampaikan cukup baik dan mendasar. Membangunkan kembali tentang permaknaan wawasan nusantara dalam berbagai konteks,” ungkap Ketua Pansus Daryatmo Mardiyanto.

Adapun usulan Lemhanas terkait RUU usulan DPD itu, pihaknya menilai wawasan nusantara merupakan Doktrin Nasional yang harus mewarnai semua regulasi atau kebijakan, sehingga penempatan Wasantara dalam tataran UU dinilai kurang tepat.

Selain itu, Lemhanas mengkhawatirkan akan terjadi duplikasi dengan tugas pokok dan dapat membatasi undang-undang fungsional jika Wasantara dibuat menjadi UU tersendiri. Kalaupun harus masuk dalam UU, maka bisa dimasukkan dalam UU No.12 Tahun 2011 seperti halnya Pancasila dan UUD 1945.

Menanggapi hal itu, Daryatmo mengatakan Pansus akan mempertimbangkan usulan tersebut untuk segera disikapi. Menurutnya,

rapat. "Ini merupakan amanat yang besar bagi saya untuk dapat memimpin Komite IHL di saat isu kemanusiaan khususnya pengungsi, migran hingga konflik dan kekerasan tengah menjadi sorotan dunia," paparnya, dalam rilis yang diterima Parlemen Rabu (26/10).

Komite IHL adalah komite yang mengurus isu-isu kemanusiaan sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan hukum perang, kombatan dan perlindungan masyarakat sipil. Komite ini menjalin kerja sama secara dekat dengan *UN High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan juga *International Committee of the Red Cross* (ICRC/Palang Merah Internasional).

Pada kesempatan tersebut, Komite IHL juga menerima perkembangan terbaru dari UNHCR mengenai situasi pengungsi



Ketua Pansus RUU Wawasan Nusantara  
Daryatmo Mardiyanto

Pansus memiliki pilihan apakah melakukan perumusan ulang atau tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

"Saya kira itu pilihannya, jadi akan ada re-formulasi yang konkret atau penyusunan kembali RUU dengan tetap mempertimbangkan wawasan nusantara sebagai sebuah norma yang mendasar. Jadi tidak menambah UU yang begitu banyak, tetapi mengaktifkan UU yang

global. Saat ini ada sekitar 4,5 juta pengungsi Suriah, 2,2 juta pengungsi Afghanistan dan 1,1 juta pengungsi Somalia. Kesemuanya memiliki basis asal yang sama, negara dalam kekerasan konflik.

"Ini tentu menjadi perhatian kita semua. Kita berharap pula bahwa parlemen dapat berbuat sesuatu tentang hal ini. Dalam kasus kunjungan lapangan Komite IHL ke Lebanon misalnya, mereka menggarisbawahi ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung ketersediaan bantuan kemanusiaan. Sumber anggaran tidak bisa hanya dari Lebanon, tetapi juga negara lain. Di sini parlemen sangat berperan penting melalui fungsi *budgeting*," urai Nurhayati.

Selain itu Komite IHL juga mendapatkan perkembangan terbaru dari sejumlah *event*

ada dalam bentuk panduan untuk pelaksanaan penegak hukumnya. Pilihannya sangat leluasa tergantung pada kesepakatan anggota dan fraksi di Pansus nantinya," jelas politisi dari dapil Jawa Tengah II itu.

Sebelumnya, Daryatmo menjelaskan konsepsi Wawasan Nusantara sudah pernah ada dan dulunya tercantum dalam Garis-garis besar Haluan Negara melalui Tap MPR Nomor IV/MPR/ Tahun 1978 dan Tap MPR Nomor II/MPR/1983. Namun, setelah GBHN dihapus, konsepsi wawasan nusantara menjadi tidak jelas perumusannya dalam produk hukum.

"Oleh karenanya, tadi disampaikan bahwa wawasan nusantara ini tetap menjadi bagian yang sama dari nilai kebangsaan yang diletakkan dalam 4 nilai kebangsaan dasar yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," sambung politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu. ■

*humanitarian* terakhir seperti *World Humanitarian Summit 2016* dan juga *UN Summit for Refugees and Migrant* yang menghasilkan deklarasi New York. Di dalamnya menekankan agenda internasional baru untuk *global compact for refugee* dan juga untuk migran.

Komite IHL juga mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan ICRC untuk melihat operasi kemanusiaan berskala besar. ICRC juga mengundang Komite IHL untuk melakukan asesmen di sejumlah operasi ICRC yang ada di dunia. "Dan ini dapat kita manfaatkan untuk *knowledge building* DPR RI. Terutama dalam kaitannya dengan pembahasan legislasi kita yakni RUU Kepalaangmerahan," jelas Nurhayati. ■

(ann.mpi) foto: Rumi/mr.

(BKSAP-eto), Foto: Dok.BKSMP/hr

## Komisi VIII Desak Mensos Perhatikan Masukan Program Rastra

Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Anda mendesak Menteri Sosial untuk memperhatikan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh masukan terkait dengan Program Rastra (beras untuk masyarakat sejahtera).

“KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Program Rastra itu pernah lewat beberapa kementerian. Namun sejak 2013 dipindahkan ke Kemensos tapi uangnya di Kementerian sosial. Oleh karena itu saya berharap agar Mensos mengupayakan agar KPA program tersebut tetap Kemensos, bukan Kementerian atau lembaga lain,” ujar Anda.

Oleh karena itu lanjut Anda, pihaknya

ke depan akan mengundang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Perum Bulog, Kemensos dan Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran dan mekanisme bantuan beras untuk masyarakat sejahtera.

"Kami juga merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk mempertimbangkan alokasi anggaran bantuan Rastra kurang lebih sekitar 1,56 Triliun untuk



Anggota Komisi VIII DPR RI H. Anda

dipindahkan dari Ditjen Pemberdayaan Sosial ke Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang ada di Kementerian tersebut," tambah Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini dalam siaran pers baru-baru ini. ■

(ayu), Foto: Jakabhr

## Tingkatkan Kualitas UMKM untuk Hadapi Persaingan MEA

Spesialisasi dan pelibatan industri dalam penentuan kurikulum pendidikan kejuruan jadi kunci daya saing Jerman. *Duales system* yang dianut Jerman memberikan peluang peningkatan keterampilan yang luas bagi generasi muda melalui proses magang sehingga dihasilkan lulusan berdaya saing yang memiliki *skill* sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan IHK (Kamar Dagang dan Industri) Rheinessen dalam kunjungan Delegasi BKSAP ke Mainz, ibukota negara bagian Rheinland Pfalz. Daya saing ekonomi nasional di tengah liberalisasi perdagangan regional menjadi fokus kunjungan BKSAP ini.

Menanggapi pernyataan tersebut Ketua Delegasi BKSAP, Juliari Batubara, memberikan respon agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mendapatkan perhatian intensif dari pemerintah, dengan begitu diharapkan kualitas UMKM mengalami peningkatan. Dia mengatakan sejalan dengan implementasi MEA, daya saing UMKM membutuhkan perhatian tersendiri.

"Perekonomian Jerman merupakan yang terbesar di kawasan Eropa dan secara mayoritas digerakkan oleh UMKM. Secara statistik, 99,6 persen perekonomian Jerman terdiri dari UMKM. Baik Jerman maupun Indonesia merupakan negara terbesar dan memegang posisi penting di regional



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliari P. Batubara berdialog dengan IHK Jerman

*grouping* masing-masing. Sehingga layak untuk menela'ah lebih dekat faktor-faktor yang memperkuat daya saing industri nasional mereka di tengah liberalisasi ekonomi kawasan," jelas Juliari dalam rilis yang diterima Parlemen, Rabu (26/10).

Selain melakukan pertemuan dengan IHK, BKSAP melakukan pertemuan dengan pelaku bisnis setempat dan kunjungan ke industri unggulan di Mainz. Untuk negara bagian Rhineland Pfalz yang memiliki penduduk 523.000, saat ini terdapat 29.000

pengusaha yang sebagian besar berkategori UMKM.

Dalam dialog dengan para pelaku UMKM dibahas berbagai isu terutama terkait peningkatan kerjasama perdagangan antara UMKM Indonesia dan Jerman. Pelaku UMKM banyak yang menanyakan mengenai peluang pasar serta aturan legislasi dan kebijakan impor Indonesia.

Selain itu ada yang menanyakan mengenai kelapa sawit. Terkait hal tersebut Ketua Delegasi BKSAP menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk produksi minyak sawit secara berkelanjutan dan penerapan proses produksi ramah lingkungan.

Kunjungan BKSAP ke Rheinland-Pfalz ditutup dengan kunjungan lapangan ke Schott AG yang memproduksi bahan baku kaca untuk industri farmasi, elektronik, optik, industri otomotif dan penerbangan. ■

(BKSAP-eko), foto: dok. bksap/br.



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI foto bersama dengan Dinas Perikanan dan para nelayan Makassar

## Komisi IV DPR RI Harapkan Pelabuhan Perikanan Untia Makassar Segera Beroperasi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin I Made Urip mengharapkan Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar bisa segera beroperasi. Pasalnya proyek pembangunan sudah berjalan selama 10 tahun dan sudah sangat ditunggu kehadirannya oleh para nelayan.

**H**al itu dikemukakannya saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV mengunjungi Pelabuhan Perikanan yang terletak di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Selasa (25/10) dan sempat berdialog dengan para nelayan.

Menurut Made pengoperasian pelabuhan mendesak dilakukan karena Sulsel memiliki sumber daya perikanan yang luar biasa. Wilayah ini juga memiliki sejarah tersendiri dengan pelaut-pelaut ulungnya. Hampir di semua wilayah termasuk di Bali nelayannya cukup banyak sehingga ada satu kampung Bugis.

Kedatangan Komisi IV lanjut dia, ingin melihat kondisi riil di lapangan pembangunan pelabuhan ini dan produksi galangan kapal dimana pada tahun anggaran 2016 dan 2017 mendapatkan alokasi yang cukup besar. Dia berharap fasilitas penunjang segera dilengkapi termasuk jalan yang rusak menuju lokasi dan pabrik es (cold storage).

Tim Komisi IV juga berkesempatan meninjau galangan kapal PT Siagan Boats yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memproduksi kapal dari ukuran 30 GT

hingga paling kecil 5 GT.

Anggota Tim Sjachrani Mataja menambahkan, pembangunan pelabuhan perikanan dan pengadaan kapal yang akan diserahkan kepada para nelayan ini merupakan langkah strategis bagi nelayan untuk meningkatkan produktifitas tangkapan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk itu, selain pemerintah pusat maka pemerintah provinsi dan kabupaten / kota bisa membantu demi kemajuan para nelayan. Dalam sesi dialog sejumlah nelayan menyampaikan keluhan adanya Permen KKP yang sangat merugikan nelayan sampai ada yang dipenjarakan. Masukan dan keluhan tersebut akan dibicarakan di tingkat pusat dengan KKP dan instansi terkait lainnya.

Selengkapnya Tim Kunspek Komisi IV I Made Urip (F-PDIP), Azhar Romli (F-PG), Sjachrani Mataja (F-Gerindra), Vivi Sumantri J (F-PD), Jamaludin Jafar (F-PAN), Indra Chunda Thita S. (F-PAN), Acep Dadang R (F-PKB) dan Fadholi (F-Nasdem). ■

(mp), Foto: mastar/br

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI



Pimpinan DPR RI Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto jabat tangan dengan Menkominfo dan Menkumham Kamis, (27/10) Foto : Arief, Kresno

RDP Komisi VII DPR RI dengan KPK dipimpin Wakil Ketua Fadel Muhammad terkait potensi korupsi migas Rabu (26/10). Foto: Naefuroji



Ketua Panitia Seminar Sumpah Pemuda PIA DPR RI Fitri Achmad Mustaqim dan Anggota PIA Alya Baskoro Yudhoyono menyerahkan cenderamata kepada pembicara dan peserta, Kamis (27/10). Foto: Jaka